

PERAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DALAM DISEMINASI INFORMASI KEGIATAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR

Mellisa Tri Utami¹, Willy Bachtiar²

^{1,2} Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University

¹mellisatriutami@apps.ipb.ac.id, ²willybachtiar@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

The development of public communication in the digital era requires local governments to disseminate information regarding leadership activities in a fast, accurate, and structured manner. In this context, the Protocol and Leadership Communication Division plays a strategic role in supporting the dissemination of information related to the activities of the Regional Secretary of Bogor City. However, studies examining the integration of protocol functions and leadership communication in the process of information dissemination within local government institutions remain limited. This study aims to identify the role of Protocol and Leadership Communication in disseminating information about the activities of the Regional Secretary of Bogor City, analyze the utilization of digital media such as Instagram and news media, and identify the obstacles encountered in the dissemination process. This research employed a qualitative approach using observation, active participation, interviews, and literature review as data collection techniques. Data were collected through direct observation of protocol and leadership communication activities at the Regional Secretariat of Bogor City and interviews with related parties. The results indicate that the synergy between protocol and leadership communication plays an important role in ensuring the smooth implementation of leadership agendas while supporting systematic information dissemination through digital and news media. The use of Instagram and news publications has contributed to expanding public access to information. However, several challenges were identified, including interdepartmental coordination issues, limited publication time, and the potential for miscommunication in delivering information regarding leadership activities. This study demonstrates that effective coordination between protocol and leadership communication is an essential factor in supporting transparent and integrated public communication within local government institutions.

Keywords: *Protocol, Leadership Communication, Information Dissemination, Public Communication, Local Government*

ABSTRAK

Perkembangan komunikasi publik di era digital menuntut pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi kegiatan pimpinan secara cepat, akurat, dan terstruktur. Dalam konteks tersebut, bagian protokol dan komunikasi pimpinan memiliki peran strategis dalam mendukung diseminasi informasi kegiatan Sekretaris Daerah Kota Bogor. Namun, penelitian yang mengkaji integrasi antara fungsi keprotokolan dan komunikasi pimpinan dalam proses diseminasi informasi di lingkungan pemerintahan daerah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam diseminasi informasi kegiatan Sekretaris Daerah Kota Bogor, menganalisis pemanfaatan media digital seperti

Instagram dan media berita, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyampaian informasi kepada publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, partisipasi aktif, wawancara, dan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas keprotokolan dan komunikasi pimpinan di Sekretariat Daerah Kota Bogor serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara protokol dan komunikasi pimpinan berperan penting dalam memastikan kelancaran agenda pimpinan sekaligus mendukung penyebaran informasi secara sistematis melalui media digital dan media berita. Pemanfaatan Instagram dan publikasi berita membantu meningkatkan jangkauan informasi kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa koordinasi antarbagian, keterbatasan waktu publikasi, dan potensi miskomunikasi dalam penyampaian informasi kegiatan pimpinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif antara protokol dan komunikasi pimpinan menjadi faktor penting dalam mendukung komunikasi publik pemerintah daerah yang transparan dan terintegrasi.

Kata Kunci: Protokol, Komunikasi Pimpinan, Diseminasi Informasi, Komunikasi Publik, Pemerintah Daerah

A. Pendahuluan

Peran protokol dan komunikasi pimpinan dalam pemerintahan daerah menjadi elemen strategis dalam mendukung diseminasi informasi kegiatan pejabat publik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, penyampaian informasi tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana prinsip *good governance* (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023). Oleh karena itu, setiap kegiatan pimpinan daerah, termasuk Sekretaris Daerah, memiliki dimensi komunikasi yang harus dikelola secara terstruktur dan terkoordinasi.

Komunikasi pimpinan berperan dalam membentuk persepsi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pimpinan daerah tidak hanya bertindak sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai representasi simbolik organisasi di ruang publik. Efektivitas komunikasi

pimpinan memengaruhi citra kelembagaan serta legitimasi kebijakan yang dijalankan (Haryanto, 2021). Dalam praktiknya, penyampaian informasi kegiatan pimpinan memerlukan dukungan sistem yang memastikan pesan tersampaikan secara konsisten, akurat, dan sesuai agenda resmi pemerintahan.

Fungsi keprotokolan memiliki posisi strategis dalam mendukung proses tersebut. Protokol tidak hanya mengatur tata acara dan tata tempat, tetapi juga berperan dalam koordinasi kegiatan resmi yang melibatkan pimpinan, perangkat daerah, serta media massa. Posisi ini menjadikan protokol sebagai simpul koordinatif antara agenda pimpinan dan proses publikasi kegiatan (Lembaga Administrasi Negara, 2022). Dengan demikian, efektivitas diseminasi informasi kegiatan pimpinan tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara fungsi protokol dan komunikasi pimpinan.

Perkembangan media digital semakin memperkuat urgensi

koordinasi tersebut. Pemerintah daerah dituntut memanfaatkan kanal digital secara terintegrasi agar informasi kegiatan pejabat publik dapat menjangkau masyarakat secara cepat dan luas. Strategi komunikasi digital yang terencana terbukti meningkatkan visibilitas kegiatan pemerintah sekaligus memperkuat citra kelembagaan (Putri & Nugroho, 2023). Namun, tanpa koordinasi yang baik antara protokol dan komunikasi pimpinan, potensi inkonsistensi pesan dan miskomunikasi dapat terjadi.

Meskipun kajian mengenai komunikasi publik pemerintah dan strategi media digital telah banyak dilakukan, penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan peran protokol dan komunikasi pimpinan dalam diseminasi informasi kegiatan pejabat daerah masih terbatas (Rahmawati, 2024). Sebagian besar penelitian berfokus pada pengelolaan media sosial instansi atau gaya komunikasi kepemimpinan secara umum, tanpa mengkaji sinergi operasional antara protokol dan komunikasi pimpinan dalam konteks kegiatan pejabat daerah.

Faktanya, Sekretaris Daerah memiliki posisi sentral sebagai koordinator administratif daerah yang kegiatannya berdampak langsung pada publik dan pemangku kepentingan. Setiap agenda Sekretaris Daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi komunikasi publik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menganalisis bagaimana kolaborasi antara protokol dan komunikasi pimpinan berperan dalam mendukung diseminasi informasi kegiatan Sekretaris Daerah secara efektif dan terstruktur.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian terkait integrasi peran protokol dan

komunikasi pimpinan dalam proses diseminasi informasi di tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara lebih spesifik praktik sinergi kedua fungsi tersebut dalam mendukung diseminasi informasi kegiatan Sekretaris Daerah Kota Bogor.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami peran Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam diseminasi informasi kegiatan Sekretaris Daerah Kota Bogor. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada proses koordinasi, komunikasi, dan praktik diseminasi informasi dalam lingkungan pemerintahan daerah. Penelitian dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bogor, selama periode Januari hingga Mei 2026.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas keprotokolan dan komunikasi pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, dokumentasi, *press release*, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang didukung dengan pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi penelitian (Creswell & Creswell, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, partisipasi aktif, wawancara, dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan

mengamati secara langsung pelaksanaan tugas keprotokolan dan proses komunikasi pimpinan dalam kegiatan Sekretaris Daerah Kota Bogor. Partisipasi aktif dilakukan melalui keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan magang, khususnya pada proses dokumentasi dan publikasi kegiatan pimpinan. Selain itu, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai mekanisme diseminasi informasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Studi literatur dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah dan keprotokolan sebagai landasan pendukung analisis penelitian (Habsy et al., 2023).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah Kota Bogor, Prokompim memiliki peran penting dalam mendukung diseminasi informasi kegiatan Sekretaris Daerah kepada masyarakat. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan fungsi keprotokolan, tetapi juga mencakup pengelolaan komunikasi publik pemerintah daerah melalui berbagai media informasi. Salah satu tugas yang dijalankan oleh subkegiatan komunikasi pimpinan adalah pembuatan *press release* terkait kebijakan, program, dan agenda pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor. *Press release* tersebut kemudian dipublikasikan melalui website resmi, media sosial, serta disebarluaskan kepada media cetak dan media online melalui grup

komunikasi dengan wartawan media. Namun, sebelum dipublikasikan kepada masyarakat, informasi terlebih dahulu melalui proses penyaringan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Selain pembuatan *press release*, Bagian Prokompim juga aktif melakukan publikasi kegiatan melalui media sosial, khususnya Instagram, sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih cepat dan luas. Pemanfaatan media digital tersebut menunjukkan bahwa Prokompim berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Peran Protokol dan Komunikasi Pimpinan penting dalam membangun citra positif pemerintah daerah melalui komunikasi publik yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi (Rahman, Azura, & Kostini, 2025). Selain itu, hubungan kerja sama antara Prokompim dengan media dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Hidayatullah, Putra, dan Jumaddil, 2022).

Dalam pelaksanaannya, Prokompim juga berfungsi sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor. Peran tersebut menjadikan Prokompim sebagai pusat koordinasi informasi dari berbagai bagian di lingkungan Setda. Bagian lain di lingkungan Sekretariat Daerah sering berkoordinasi dengan Prokompim untuk membantu publikasi program, kebijakan, maupun kegiatan pemerintahan, baik dalam bentuk berita, unggahan media sosial, maupun dokumentasi foto dan video. Selain menerima permintaan publikasi, Prokompim juga secara aktif

melakukan peliputan kegiatan yang melibatkan Sekretaris Daerah dan asisten daerah untuk kemudian diolah menjadi bahan publikasi.

Proses diseminasi informasi dilakukan melalui beberapa media, seperti website resmi Sekretariat Daerah, Instagram, serta media berita online dan cetak. Website digunakan untuk memuat agenda pimpinan harian, *press release*, dan berbagai informasi terkait perangkat daerah. Sementara itu, media sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan jangkauan informasi kepada masyarakat secara lebih cepat. Prokompim bersama Dinas Kominfo juga bekerja sama dengan wartawan media cetak dan online dalam menyebarkan pemberitaan terkait kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor. Pemanfaatan berbagai media tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan komunikasi digital untuk meningkatkan transparansi dan citra kelembagaan pemerintah. Strategi komunikasi pemerintah daerah pada era digital banyak diarahkan melalui media online, seperti website dan media sosial, guna mempermudah penyampaian informasi kepada Masyarakat (Sari & Soegiarto, 2021).

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses diseminasi informasi kegiatan pimpinan. Salah satu kendala utama adalah koordinasi antarbagian yang belum berjalan secara optimal sehingga informasi terkadang tidak tersampaikan secara merata dan tepat waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan optimalisasi koordinasi melalui grup komunikasi digital internal. Selain itu, proses pengelolaan dokumentasi dan berita juga memerlukan waktu yang

cukup lama sehingga dapat menghambat kecepatan publikasi informasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan batas waktu (*deadline*) yang lebih tegas terhadap hasil kerja peliputan dan publikasi.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam kemampuan komunikasi publik dan pengelolaan media digital. Tidak semua pegawai memiliki keterampilan yang memadai dalam pengelolaan publikasi dan penggunaan perangkat digital pendukung. Oleh karena itu, Prokompim melakukan pelatihan dan workshop bagi admin media sosial dan petugas peliputan, serta melakukan pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Selain itu, tingginya rotasi dan mutasi pegawai juga menjadi hambatan dalam menjaga kesinambungan koordinasi dan alur informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan proses transfer informasi dan kaderisasi kepada pegawai yang dianggap kompeten agar proses komunikasi dan publikasi tetap berjalan dengan baik. Keterbatasan koordinasi dan pola komunikasi organisasi dapat memengaruhi pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga diperlukan kerja sama antarbagian dan pemanfaatan media sosial dalam mendukung penyebaran informasi pemerintah (Mayu & Mustari, 2023).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah Kota Bogor memiliki peran penting dalam

mendukung diseminasi informasi kegiatan Sekretaris Daerah kepada masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui pembuatan *press release*, pengelolaan media sosial, dokumentasi kegiatan, serta koordinasi publikasi informasi dengan berbagai pihak terkait. Fungsi keprotokolan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mendukung citra dan komunikasi kelembagaan pemerintah (Santoso, 2022).

Dalam pelaksanaan diseminasi informasi, Prokompim memanfaatkan berbagai media digital, seperti website resmi Sekretariat Daerah, Instagram, serta media berita online dan cetak. Pemanfaatan media digital tersebut membantu memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat serta mendukung keterbukaan informasi publik. Strategi komunikasi digital pemerintah daerah mampu meningkatkan visibilitas kegiatan pemerintah dan memperkuat citra kelembagaan (Putri & Nugroho, 2023).

Selain itu, koordinasi antara Prokompim, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta media mitra turut mendukung efektivitas penyampaian informasi kegiatan pimpinan daerah. Efektivitas diseminasi informasi dipengaruhi oleh koordinasi internal, kejelasan alur komunikasi, dan dukungan organisasi dalam penyampaian informasi public (Widodo, 2021).

Meskipun demikian, proses diseminasi informasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti koordinasi antarbagian yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, lamanya proses pengelolaan dokumentasi dan publikasi, serta tingginya rotasi pegawai. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai upaya, seperti peningkatan koordinasi melalui

grup komunikasi digital, pemberian *deadline* kerja yang lebih tegas, pelatihan pengelolaan media digital, serta kaderisasi pegawai.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara fungsi protokol dan komunikasi pimpinan memiliki peran strategis dalam mendukung komunikasi publik pemerintah daerah yang transparan, terintegrasi, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Habsy, B. A., et al. (2023). Metode penelitian kualitatif dalam kajian pendidikan dan sosial. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, 8(1), 45–56.
- Haryanto. (2021). Komunikasi kepemimpinan dalam organisasi publik. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 6(2), 115–128.
- Hidayatullah, M., Putra, M. R. A., & Jumaddil. (2022). Peranan Protokoler dan Komunikasi Pimpinan dalam Meningkatkan Citra. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis*, 8(1).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Laporan tahunan komunikasi publik pemerintah. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara. (2022). Penguatan tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Jakarta: Lembaga

- Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Mayu, E. F., & Mustari, A. M. (2023). Pola Komunikasi Organisasi Bagian Keprotokoleran Kantor Pemerintah Kabupaten Muna Dalam Peningkatan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat. *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 4(1).
- Putri, A., & Nugroho, D. (2023). Strategi komunikasi digital pemerintah daerah dalam membangun citra publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 45–60.
- Rahman, E. N., Azura, N., & Kostini, N. (2025). Optimalisasi Peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Dalam Membangun Citra Positif Pemda. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik (e-JKPP)*, 11(1).
- Rahmawati, L. (2024). Integrasi fungsi protokol dan komunikasi pimpinan dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 78–92.
- Santoso, B. (2022). Peran keprotokolan dalam mendukung citra institusi pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 55–69.
- Sari, W. P., & Soegiarto, A. (2021). Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 188–205.
- Widodo, J. (2021). Transparansi dan komunikasi publik dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 40–52.